

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

I. Kebijakan Publik

a. Kebijakan Publik

Penerapan kebijakan publik di kabupaten indramayu pada peraturan daerah no 15 tahun 2006 tentang penjualan dan pengawasan minuman beralkohol yang dibuat oleh pihak pemerintah daerah guna mengatur pengawasan, penertiban, dan pemberantasan terhadap minuman beralkohol dalam rangka menjaga ketentraman dan pelestarian nilai-nilai luhur masyarakat kabupaten indramayu. kebijakan publik memiliki arti suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah dalam mengatasi suatu permasalahan tertentu yang terjadi ditengah masyarakat dalam melakukan suatu kegiatan atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan melalui instansi yang memiliki kewenangan dalam mengatur hal tersebut dimana ini merupakan tugas pemerintah. Keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah itu dituangkan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan.¹³

David Easton berpendapat bahwa kebijakan publik adalah sebagai porsi nilai-nilai secara otoritatif bagi seluruh masyarakat. Easton berpendapat bahwasanya pemerintah saja yang memiliki kewenangan untuk bertindak secara otoritatif kepada masyarakat secara keseluruhan,

¹³Mustopadidjaja AR. 2003. Manajemen Proses Kebijakan Publik. (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI).h.5.

atas dasar tindakan pemerintah itu adalah hasil pilihan untuk melakukan sesuatu.¹⁴

Sedangkan menurut Zaid Zainal Abidin Pengertian kebijakan publik adalah sesuatu yang tidak bersifat sempit dan spesifik. Akan tetapi, justru bersifat strategis dan luas. Oleh karena itu, kebijakan publik memiliki fungsi sebagai sebuah pedoman umum kebijakan. Serta memiliki keputusan khusus di bawahnya.¹⁵

Walaupun masih banyak mengenai pendapat tentang kebijakan negara seperti yang telah dipaparkan diatas sebelumnya, dalam setiap kebijakan pasti membutuhkan orang yang memiliki tanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pihak pemerintah. Kebijakan publik sering kali dibacakan dalam lingkup otoritas negara, dan persoalan-persoalan yang seringkali muncul selama ini dapat disebabkan oleh kurangnya kompetensi dari aparat terkait yang tidak memadai dan juga pilihan agenda yang seringkali kurang tepat sasaran.

Dalam proses antar individu, suatu proses kebijakan dapat tercipta dengan sendirinya. Proses antara peraturan dan pertukaran antar individu dapat menciptakan sebuah mekanisme sendiri tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan, yaitu adalah sebuah proses yang panjang dari transformasi di bidang politik.

Sebuah proses kebijakan adalah bentuk dari sebuah proses yang rumit.

Atau bisa dibilang rumit ini merupakan suatu kebijakan turut ikut ambil

¹⁴Bernadus Luankali, 2007. Analisis Kebijakan Publik Dalam Proses Pengambilan Keputusan. (Jakarta: Amelia Press).h.1.

¹⁵ Said Zainal Abidin (2004: 23)

andil dalam proses kebijakan yang ada. Hal itu sangatlah memungkinkan terjadi mengingat sebuah proses kebijakan selalu lahir dan tumbuh besar paada ruang dan waktu yang tidak kosong.

Atas pengertian kebjakan publik yang sudah dipaparkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Kebijakan publik terlahir atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah
2. kebijakan publik dibuat untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu pasti memiliki tujuan tertentu
3. kebijakan publik mengarah untuk kepentingan masyarakat umum.¹⁶

b. Proses Pembuatan Kebijakan Publik

1. Pembuatan Kebijakan Sebagai Proses Politik

Teori kebijakan publik menjelaskan bahwasanya pembuatan kebijakan publik harus dipahami secara luas yaitu sekuel dari aktivitas yang didalamnya terdapat rangkaian aktivitas

2. Pembuatan Kebijakan Sebagai Tahapan atau Seri Aktivitas

Proses pembuatan kebijakan publik sebagai sekuel aktivitasnya meliputi beberapa tahap yaitu:

- a) Menyusun agenda

¹⁶Puji Meilita Sugiana."ImplementasiKebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Jakarta Selatan". Diakses dari Digital_20317298-T31556-implementasikebijakan.pdf. h.15. pada tanggal 2 bulan maret 2018 pukul 13.30.

- b) melakukan formula kebijakan
- c) mengangkat suatu rekomendasi kebijakan
- d) pemantauan implementasi kebijakan
- e) evaluasi dari kebijakan tersebut.¹⁷

c. Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan publik dapat diartikan sebagai penentu dalam alternatif atas kebijakan publik yang dapat memberikan jalan keluar atas berbagai macam alternatif dari kebijakan publik dan pemerintahan, dan akan mencapai tujuan-tujuan didalam hubungan antara kebijakan dengan tujuan. Penjelasan ini menentukan 5 unsur pokok dari evaluasi kebijakan:

1. Tujuan, termasuk berbagai hambatan normative dan pertimbangan-pertimbangan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
2. Kebijakan, proyek, program, keputusan, sarana, pilihan ataupun alternatif-alternatif lain yang ada untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. hubungan antara kebijakan dengan tujuan termasuk hubungan yang dapat terbentuk melalui kewenangan, intuisim pengamatan, statistik, deduksi ataupun melalui sarana lain.
4. Menarik kesimpulan sementara untuk kebijakan yang mana kebijakan yang terbaik yang akan dimasukan kedalam tujuan, kebijakan, dan hubungan

¹⁷Bernadus Luankali, 2007. Analisis Kebijakan Publik Dalam Proses Pengambilan Keputusan. (Jakarta: Amelia Press) h.6.

5. Menentukan opsi dalam menentukan suatu alternatif kebijakan.¹⁸

Teori-teori yang seringkali digunakan dalam menganalisis kebijakan publik mencakup evaluasi, studi, evaluasi program, ilmu manajemen publik, dan ilmu kebijakan. Seseorang dapat membuat perbedaan antara teori-teori itu sebagai berikut:

1. Evaluasi kebijakan yang berarti kita menjabarkan alasan mengapa suatu kebijakan ini perlu ada.
2. Studi kebijakan yang berarti tentang penjelasan kebijakan, eksistensi, dan melakukan evaluasi.
3. Evaluasi Program lebih menekankan pada evaluasi suatu program khusus seperti Halfway house di Chicago pada tahun 1984, apabila dibandingkan dengan pengembangan berbagai macam prinsip-prinsip umum cara mengevaluasi suatu kebijakan.
4. Ilmu manajemen publik yang menitikberatkan pada pembuatan suatu keputusan yang terlibat pada proses implementasi suatu keputusan yang lebih besar, pada umumnya dibuat oleh badan pembuat undang-undang dan dinas terkait.
5. Analisis kebijakan menitikberatkan pada metode analitis sistematis yang dapat menjadi kualitatif atau kuantitatif.
6. Ilmu kebijakan menitikberatkan kepada metode kuantitatif, dan lebih mengacu dalam pembuatan kebijakan publik menggunakan metode analisa berupa:

¹⁸Hessel Nogi.S Tangkilisan, 2003. Evaluasi Kebijakan Publik. (Yogyakarta: Balairung & Co).h.1.

- A. Bagaimana cara penarikan suatu kesimpulan sebagai kebijakan mana yang lebih tepat untuk diambil dari informasi dalam tujuan, hubungan, dan kebijakan.
- B. Bagaimana cara pembentukan hubungan antara kebijakan dengan tujuan
- C. Bagaimana cara untuk melakukan penentuan kebijakan yang ada untuk diadopsi dan apakah tujuan yang tepat untuk dipertimbangkan.

II. Implementasi Kebijakan Publik

a. Pengertian Implementasi Kebijakan

Apabila kita melihat kebijakan sebagai suatu proses, maka kita akan lebih terfokus pada siklus kebijakan tersebut, meskipun itu terlihat tidak berjalan secara linier dan kaku. Pada umumnya siklus kebijakan tersebut terdapat formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Kebijakan yang telah dilakukan formulasi itu bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini dapat dipahami apabila maksud dari Lineberry apabila suatu kebijakan tidak akan sukses apabila dalam implementasinya tidak memiliki keterkaitan dengan tujuan yang sudah ditetapkan.

Akan tetapi banyak dari kita sering menilai apabila setelah suatu kebijakan sudah disahkan oleh pihak yang memiliki wewenang dengan sendirinya kebijakan tersebut dapat diimplementasikan, dan akan mendapatkan hasil yang diharapkan oleh pembuat kebijakan-kebijakan tersebut. Akan tetapi, menurut Ismay sifat dari kebijakan itu sangatlah kompleks dan saling ketergantungan, sehingga sifat kebijakan

negara yang self-executing itu sangat sedikit jumlahnya. Yang memiliki arti apabila suatu kebijakan sudah dirumuskan akan dapat dengan sendirinya kebijakan tersebut diimplementasikan oleh pemerintah. Akan tetapi yang saat ini banyak terjadi merupakan kebijakan yang bersifat Nonseld-executing yang memiliki arti suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah perlu diimplementasikan oleh berbagai pihak yang memiliki wewenang sehingga memiliki dampak yang diharapkan.

Berkaitan atas pernyataan yang sudah dijelaskan, Pressman dan Wildavsky menjelaskan apabila suatu proses dalam pelaksanaan kebijakan harus diperhatikan dengan seksama. Atas dasar hal tersebut adalah salah apabila ada yang menilai apabila proses implementasi kebijakan akan dengan sendirinya berjalan tanpa ada hambatan. Bahkan Udoji menambahkan apabila implementasi dalam suatu kebijakan adalah suatu hal yang penting, bahkan jauh lebih penting diatas pembuatan ssuatu kebijakan. Kebijakan hanyalah angan-angan apabila tidak diimplementasikan dengan baik.¹⁹

Atas hal tersebut, dapat dikatakan apabila dalam salah satu penilaian keberhasilan suatu kebijakan terletak pada bagaimana proses implementasinya. Bahkan implemementasi kebijakan adalah aspek yang paling epnting dari seluruh proses kebijakan. Akan tetapi implementasi kebijakan terpisah dengan formulanya, akan tetapi keberhasilan dalam suatu kebijakan yang dibuat sangatlah tergantung terhadap tatanan kebijakan itu sendiri (macro policy and micro policy). Yang memiliki arti

¹⁹Putra Fadillah, 2003. "Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset).h.79.

apabila suatu formula dari kebijakan makro yang akan ditetapkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku kebijakan mikro yang mempengaruhi keberhasilan atas implementasi tersebut. Selain itu Palumbo juga menjelaskan apabila kegagalan dalam implementasi kebijakan merupakan ketidak jelasan kebijakan dalam perundang-undangan. Atas dasar hal itulah lemahnya implementasi pada umumnya disebabkan oleh lemahnya tatanan formulasi.

Penjelasan lebih dalam dijelaskan oleh Van Mater dan Van Horn yang menyatakan apabila bahwa “policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions”. Yang memiliki arti penerapan suatu kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu dan kelompok baik kelompok pemerintah dan swasta, yang akan dibimbing pada keberhasilan tujuan dan sasaran yang menjadi hal paling penting dalam keputusan kebijakan. Sederhananya dapat dikatakan apabila perumusan kebijakan dan dampak dari kebijakan tersebut merupakan tindakan yang atas implementasi kebijakan tersebut.²⁰

Atas dasar itulah implementasi suatu kebijakan memiliki maksud untuk dapat memahami hal apa yang akan terjadi setelah suatu program dirumuskan, dan dampak yang dihasilkan dari program kebijakannya tersebut. Selain itu, implementasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan masalah administrative, akan tetapi juga dalam pengkajian faktor-faktor

²⁰Ibid.h.81.

lingkungan yang dapat berdampak pada proses implementasi kebijakan tersebut.²¹

b. Model implementasi kebijakan publik

Keberhasilan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan ditentukan melalui banyak faktor yang masing-masing faktor tersebut saling berketerkaitan satu dengan yang lainnya. Keberhasilan dalam implementasi suatu kebijakan sangatlah ditentukan melalui model implementasi yang dapat menjamin kompleksitas masalah yang akan dipecahkan melalui kebijakan tersebut. Model implementasi kebijakan ini tentu hal yang sangat diharapkan adalah model yang semakin operasional sehingga mampu menjabarkan hubungan sebab akibat antar faktor yang terkait dengan kebijakan.

1. Bentuk Implementasi Kebijakan Publik Van Horn dan Van Meter

Implementasi dari kebijakan memiliki berbagai macam bentuk. Bentuk implementasi pertama yang dicetuskan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn menjelaskan apabila model ini mengandalkan apabila dalam mengimplementasikan kebijakan dapat berjalan secara liner dari kebijakan publik, pihak pelaksana dan kinerja dari kebijakan publik. Adapun beberapa faktor yang dimasukkan kedalam suatu hal yang dapat mempengaruhi kebijakan publik yaitu:

- a) aktivitas dalam mengimplementasikan suatu kebijakan dan cara berkomunikasi antar organisasi

²¹Ibid.h.84.

- b) karakteristik dari pihak yang diberikan wewenang untuk melaksanakan kebijakan.
- c) kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang ada di suatu daerah
- d) kecenderungan pihak yang diberikan wewenang untuk melaksanakan kebijakan.

Dalam banyaknya program, dukungan dan koordinasi dengan instansi lain merupakan hal yang sangat penting dalam implementasi sebuah program. Atas dasar itulah dibutuhkan koordinasi dan juga kerjasama antar instansi demi kelancaran suatu program. Yang dimaksud dengan pihak pelaksana kebijakan merupakan norma-norma, struktur birokrasi, dan pola hubungan yang terjadi didalam birokrasi, dan implementasi suatu program akan dipengaruhi oleh hal tersebut. Lalu pada faktor kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat menambah keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan; sejauh manakah kelompok yang memiliki kepentingan dapat memberi dukungan kepada pihak pelaksana kebijakan; karakteristik para peserta yaitu melakukan penolakan atau mendukung; bagaimana sifat dari opini publik yang ada di lingkungan tersebut; dan apakah pemerintah mendukung implementasi kebijakan tersebut.

Terdapat 3 hal penting dalam catatan pihak pelaksana kebijakan berupa:

- a) Tanggapan dari para pihak pelaksana kebijakan atas kebijakan yang akan mempengaruhi keinginannya untuk melaksanakan suatu kebijakan
- b) Kognisi yaitu pemahamannya atas kebijakan yang akan diterapkan

c) Intensitas catatan pihak pelaksana kebijakan yaitu preferensi nilai-nilai yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan.²²

2. Bentuk Grindle

Grindle berpendapat apabila suatu kebijakan ditentukan melalui isi kebijakan dan konteks implementasinya. Pendapat grindle ini hampir sama penjabarannya dengan pendapat dari Mater dan Horn, berupa melihat implementasi melalui terpengaruhnya suatu lingkungan oleh kebijakan tersebut. Pernyataan mereka hampir sama dengan gagasan yang sekarang berkembang dalam studi kelembagaan.

Menurut grindle suatu pelaksanaan kegiatan terpengaruh oleh:

a. Isi dari kebijakan tersebut

- . Kepentingan yang dipengaruhi

- . Jenis manfaat

- . Perubahan yang diharapkan dari kebijakan terkait

- . Pengambilan keputusan oleh pemerintah

- Pihak pelaksana program tersebut

- Sumber daya yang terlibat

b. Konteks implementasi

- Kepentingan, kekuasaan, dan strategi pihak yang terlibat.



²²Samodra Wibawa DKK, 1994. "Evaluasi Kebijakan Publik" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).h.21.

- Karakteristik pemerintahan
- Daya tanggap dan kepatuhan

Kedudukan dalam pembuat kebijakan dapat dilihat melalui isi kebijakan. Apabila posisi pembuat kebijakan tersebut dapat mempengaruhi bagaimanakah penerapan kebijakan tersebut. Contoh kebijakan tentang pelatihan tenaga kerja yang dibentuk oleh menteri tenaga kerja dan menteri riset dan teknologi tentu akan berbeda hasilnya dengan yang dibuat oleh menteri pendidikan.

Hal ini dapat diakibatkan dari kedudukan ketiga pemilik kekuasaan yang sangatlah berbeda. Konteks dalam kebijakan dapat mempengaruhi bagaimana proses implementasi kebijakan tersebut sebagaimana pengaruh ekonomi, sosial, dan politik seperti yang dijelaskan dalam bentuk dari Meter dan Horn. Yang dimaksud oleh Grindle dalam konteks kebijakan adalah 1. Kepentingan, kekuasaan, dan strategi pihak yang terlibat, 2. Karakteristik pemerintahan, 3. Daya tanggap dan kepatuhan pada pelaksana kebijakan, sejauh mana keterlibatan para perencana, pengusaha, politisi, kelompok sasaran, dan para pelaksana program akan saling berinteraksi mempengaruhi efektifitas penerapan kebijakan tersebut.²³

3. Bentuk Implementasi Kebijakan Publik Sabatier dan Mazmanian

Penerapan kebijakan publik merupakan fungsi dari 3 faktor yaitu:

- a. Karakteristik dari masalah
- b. Berbagai macam peraturan yang mengoperasionalkan kebijakan dapat dicerminkan melalui struktur manajemen program

²³Ibid.h.25.

c. Variabel-variabel lain diluar dari peraturan

Pola pikir mereka pada dasarnya sama dengan kedua bentuk diatas, dalam hal perhatian pada persoalan-persoalan yang mendasar tentang kebijakan beserta lingkungan kebijakan tersebut. Akan tetapi pemikiran dari Sabatier dan Mazmanian ini dinilai apabila dalam suatu penerapan kebijakan akan lebih efektif apabila birokrasi pelaksana dapat mematuhi apa saja yang telah dituliskan di dalam peraturan (petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan). Atas dasar itulah bentuk ini disebut dengan bentuk top-down.²⁴

Atas pemikiran tersebut, sasaran dan tujuan dari program haruslah jelas dan juga konsisten, karena hal ini adalah standar evaluasi dan sarana legal bagi birokrasi para pelaksana untuk mengeluarkan sumber daya. Alasan dari kebijakan haruslah logis, karena dalam suatu kebijakan faktor independen berpengaruh kepada perubahan kondisi fisik dan sosial yang diinginkan. contohnya apabila kebijakan tentang inovasi pertanian memiliki maksud untuk peningkatan kesejahteraan para petani, maka harus tersedia juga penjabaran empiris dan paling tidak teoritis apabila inovasi pertanian akan memperbaiki kondisi dari para petani dengan sendirinya. Hal yang seharusnya dipenuhi menurut Sabatier dan Mazmanian adalah:

1. Karakteristik masalah

- a. Tersedianya teori teknis dan teknologi
- b. Berbagai macam pelaku dari kelompok sasaran

²⁴Ibid.h.26.

- c. Sifat dari populasi tersebut
 - d. Perubahan perilaku yang diinginkan
2. Daya dukung peraturan
- a. Kejelasan dari tujuan dan sasaran
 - b. Teori sebab akibat yang memadai
 - c. Sumber keuangan yang memadai
 - d. Kemampuan organisasi pelaksana
 - e. Tindakan yang ditetapkan pelaksana
 - f. Proses rekrutmen dari pejabat pelaksana.
 - g. Akses resmi para pelaksana kebijakan ke organisasi lain
3. Faktor non-peraturan
- a. Kondisi ekonomi, sosial, dan teknologi
 - b. Perhatian awak media pada masalah kebijakan
 - c. Dukungan dari public
 - d. Sikap dari kelompok sasaran utama
 - e. Dukungan dari otoritas
 - f. Kesadaran dan kemampuan para pejabat pelaksana
4. Proses implementasi
- a. Hasil kebijakan dari organisasi pelaksana
 - b. Kesamaan hasil kebijakan dengan kelompok sasaran utama
 - c. Dampak nyata hasil dari kebijakan
 - d. Dampak yang diperkirakan
 - e. Perbaikan kebijakan.



Apabila hal tersebut sudah dilaksanakan, dalam tahap implementasi para pejabat pelaksana serta kelompok sasaran utama haruslah patuh terhadap program tersebut. Tanpa adanya kepatuhan dari pihak terkait, tujuan dari kebijakan yang ingin diterapkan tidak akan mampu dicapai dan akan menjadi angan-angan saja. Walaupun demikian tindakan yang dilakukannya oleh para pejabat merupakan hal yang tidak dapat untuk dihindari, karena faktor dari lingkungan yang sering kali berubah. Atas dasar itulah prosedur rekrutmen pejabat pelaksana haruslah mampu untuk meyakinkan didapatkan birokrat lapangan yang memanglah ahli dalam mengerahkan sumber daya dan memiliki inisiatif dalam pengambilan keputusan dalam merubah suatu kebijakan.²⁵

III. Penjualan dan Pengawasan

Penjualan merupakan suatu proses membeli barang pada suatu waktu dan tempat dan menjual kembali barang tersebut di waktu dan tempat lainnya untuk mendapatkan keuntungan bagi penjual. Pengawasan merupakan proses kegiatan yang memantau apa yang sedang dilaksanakan, dijalankan, atau diselenggarakan atas dasar apa yang dikehendaki, diperintahkan, atau direncanakan. Lord Acton menjelaskan apabila kekuasaan sekecil apapun akan memiliki kecenderungan untuk disalahgunakan. Atas dasar hal tersebut dengan adanya kebebasan bertindak dapat menyebabkan kerugian yang akan dialami oleh masyarakat.²⁶

²⁵Ibid.h,27.

²⁶Bohari, 1992. Pengawasan Keuangan. (Jakarta: Rajawali).h.25

M. Manullang berpendapat apabila tujuan utama dari diadakannya pengawasan merupakan mengusahakan agar apa yang ingin dicapai dapat terealisasi.²⁷

Akan tetapi tujuan pengawasan menurut Sukarno K. adalah yaitu:

- a. Untuk dapat mengetahui apakah suatu aturan dapat teralisasi sesuai dengan keinginan yang sudah direncanakan.
- b. Untuk dapat mengetahui apakah seluruh proses dilaksanakan sesuai dengan arahan dan asas yang sudah di tentukan
- c. Untuk dapat mengetahui hambatan-hambatan, kelemahan, dan kesulitan dalam bekerja
- d. Untuk dapat mengetahui seluruh proses tersebut apakah berjalan secara efisien.
- e. Untuk mencari penyelesaian apabila ditemukan hambatan, kesuliitanm dan kelemahan ke rah memperbaiki hal tersebut.

Kepala daerah dan peraturan daerah memiliki hak untuk memberikan keputusan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemerintah daerah, adalah suatu akibat mutlak dari dibentuknya suatu Negara Kesatuan. Didalam Negara Kesatuan tidak ada badan atau instansi yang kedudukannya sejajar dengan negara, tidak mungkin juga ada negara didalam negara.²⁸

IV. Minuman Alkohol

Alkohol nerupakan bahan atau zat sering disalahgunakan oleh manusia, alkohol didapatkan melalui proses peragian atau fermentasi madu, sari buah,gula atau umbi-umbian. Dari proses fermentasi tersebut didapatkanlah alkohol dengan kadar hingga 15% akan tetapi dilakukan melalui proses penyulingan (destilasi)

²⁷M. Manullang,1995. Dasar-Dasar Managemen. (Jakarta: Ghalia Indonesia).h.173.

²⁸Irawan Soejito, 1983. Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. (Jakarta: PT.Bina Aksara).h.9.

dapat menghasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi dari sebelumnya bahkan dapat mencapai 100%. Kadar alcohol. Didalam system peredaran darah maksimum efek dari alcohol dapat dicapai dalam kurun waktu 30-90 menit. Setelah diserap oleh tubuh, alkohol akan disebarluaskan ke dalam seluruh jaringan dan cairan tubuh. Dengan meningkatnya kadar alkohol dalam darah seseorang akan menjadi euphoria atau merasakan kesenangan, akan tetapi dengan penurunannya orang tersebut akan mengalami depresi.

Minuman beralkohol merupakan minuman yang mengandung alkohol. Alkohol merupakan bahan atau zat psikoaktif dan apabila seseorang mengkonsumsinya dapat menyebabkan penurunan kesadaran. Bahan atau zat psikoaktif yang terdapat didalam alkohol merupakan etil alkohol yang didapatkan melallui proses fermentasi madu, sari buah, gula atau umbi-umbian. Adapun beberapa jenis minuman yang didalamnya terdapat kadar alkohol yaitu:

1. Bir: memiliki kadar kandungan alcohol sebanyak 2-8%
2. Dry Wine: memiliki kadar kandungan alcohol sebanyak 8-14%
3. Vermouth: memiliki kadar kandungan alcohol sebanyak 18-20%
4. Cocktail wine: memiliki kadar kandungan alcohol sebanyak 20-21%
5. Cordial: memiliki kadar kandungan alcohol sebanyak 25-40%

Banyak sekali macam-macam jenis minuman beralkohol diantaranya adalah Bir, Amer, Brendi Bourbon, Brugal, Chianti, Caipirinha, Mirin, Prosecco, Rum, Sake, Shochu, Tuak, Vodka, Sampange, Whisky, Gyn dan masih banyak lainnya. Dampak dari mengkonsumsi alkohol dapat menyebabkan bunuh diri, kasus penganiayaan, kecelakaan lalu lintas, dan kecelakaan kerja. Hal tersebut dapat

diakibatkan karena kehilangannya kesadaran seseorang dalam melakukan aktivitasnya.

Alkoholisme merupakan suatu bentuk kebiasaan meminum minumanan alcohol sampai berefek halusinasi sehingga si peminum merasakan ketidaksadran diri, efek psikis dan berefek kepada fisiknya. Ada dua jenis alkoholisme, yaitu:

a. Alkoholisme kronis merupakan gejala yang dialami oleh seseorang yang tidak sehat kejiwaannya, selama perjalanannya banyak merusak penderita-penderita yang sangat malang, dan terjadi perilaku kejahatan yang berbagai macam akibat dari penyimpangan perilaku dari penderita ini.

b. Alkoholisme yang akut berbahaya, merupakan gejala yang dialami bagi peminum karena kehilangan kesadaran untuk melakukan aktivitasnya. Hal ini dapat terjadi secara tiba-tiba dengan maksud peminum justru berkeinginan untuk menimbulkan kehilangan kesadaran dan daya tahan diri agar dengan mudah dapat merasakan kesenangannya. Alkohol apabila disalah gunakan seperti penjelasan diatas, akan membahayakan manusia dan lingkungannya karena jiwa dari seseorang merupakan hal paling lemah sebab sebelumnya tidak terlatih secara sedikit demi sedikit.

Kedua jenis tersebut memiliki karakteristik yang sama berupa dapat menyebabkan peminum menderita pada saat mabuk, baik fisik dan juga psikisnya. Akan tetapi apabila dilakukan perbandingan, maka alkoholis yang akut sangat lebih mengkhawatirkan bagi peminum dikarenakan tubuhnya belum terlatih atau belum terbiasa. Kelompok ini pada kenyataannya tidak terbiasa untuk meminum alkohol, akan tetapi karena adanya dorongan tertentu, yaitu ingin lari dari kenyataan permasalahan social yang dialaminya, menjadikannya untuk memberanikan diri

untuk mulai meminum minuman beralkohol dengan kadar dan volume yang cukup banyak. Lalu pada saat seseorang sudah mabuk berat aka nada perilaku yang tanpa sadar akan dirinya. Pada saat sudah dalam posisi seperti itu terkadang peminum yang sudah kehilangan kesadarannya bisa langsung mengamuk, mengigau, muntah-muntah, dan hal lain sebagainya.²⁹

Alkohol memiliki pengaruh jangka pendek dan jangka panjang apabila dikonsumsi oleh seseorang. Kehilangan produktifitas kerja dan melakukan suatu tindak kriminal tanpa disadari oleh peminum alcohol merupakan pengaruh alcohol jangka pendek. Apabila alcohol sudah dikonsumsi secara berlebihan dalam jangka waktu yang panjang dapat mengakibatkan kerusakan organ-organ didalam tubuh manusia seperti kerusakan hati, tekanan darah tinggi, kanker, kerusakan jantung, gangguan saluran pencernaan, impotensi, stoke dan berkurangnya kesuburan baik bagi wanita dan pria, kesulitan untuk beristirahat, meningkatnya resiko terkena kanker payudara, kerusakan otak dengan adanya perubahan kepribadian dari peminum dan suasana perasaan yang dapat berubah dengan cepat, mengalami kesulitan dalam mengingat sesuatu dan kesulitan untuk konsentrasi.³⁰

V. Deskripsi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu

Perlindungan warga negara secara hukum adalah hal yang wajib dilakukan bagi sebuah pemerintahan negara baik secara jasmani maupun rohani, perlindungan yang dilakukan oleh negara merupakan hak dari warga negara. Perlindungan atas kesehatan warga negara sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang kesehatan. Mengingat hal

²⁹Soedjono Dirdjosisworo, 1984. Alkoholisme Paparan Hukum dan Kriminologi. (Bandung: Remadja Karya CV).h.2

³⁰Ibid.h.27.

yang sudah tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan diatur juga dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, atas dasar itulah harus adanya penetapan kebijakan tentang pengawasan minuman beralkohol yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu.³¹

Ada juga tujuan dibuatnya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu adalah untuk membuat Kabupaten Indramayu terbebas dari peredaran minuman beralkohol yang merupakan perilaku yang sangat bertentangan dengan ajaran agama, norma, ketertiban umum, dan adat istiadat yang memiliki dampak negatif pada setiap kehidupan masyarakat.³² Apabila hal-hal tersebut sudah terkendali maka keamanan, ketentraman, kenyamanan dan nilai-nilai luhur dari masyarakat Kabupaten Indramayu yang agamis dapat berjalan dan dilestarikan sehingga permasalahan-permasalahan tersebut yang mengganggu masyarakat perlu diatur dalam peraturan daerah.

³¹Lihat Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol Di kabupaten Indramayu.

³²Soedjono Dirdjosisworo, 1984. Alkoholisme Paparan Hukum dan Kriminologi. (Bandung: Remadja Karya CV).h.4.